

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Efektivitas Rencana Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, selaku SKPD juga mengusulkan rencana kebutuhan barang milik daerah. Pada tahun 2023, BPKPD mengusulkan rencana kebutuhan pengadaan barang sebanyak 27 (dua puluh tujuh) jenis barang dengan jumlah 135 unit barang seperti laptop, komputer, printer, dan sebagainya. Penyusunan rencana kebutuhan pengadaan barang milik daerah tersebut disusun berdasarkan surat pemberitahuan usulan RKBMD dari Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah Kota Banjar. Menindaklanjuti surat tersebut, BPKPD selaku SKPD perlu menyusun usulan RKBMD Pengadaan melalui bagian perencanaan pada Sekretariat BPKPD bersama dengan pengurus barang pengguna BPKPD, serta koordinasi dengan masing-masing bidang. Setelah usulan terakomodir dari setiap

bidang, bagian perencanaan melakukan penelaahan dengan dibantu oleh Sekretaris Badan. Penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan diutamakan untuk memastikan kebenaran data masukan (input) penyusunan usulan RKBMD Pengadaan yang paling sedikit mempertimbangkan:

- a. kesesuaian program perencanaan dan standar (standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga); dan/atau
 - b. ketersediaan barang milik daerah di lingkungan Pengguna Barang.
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, penyusunan RKA Tahun 2023 pada BPKPD juga mengikuti sesuai arahan surat edaran. Pada saat surat edaran Kepala Daerah untuk penyusunan RKA sudah disebar, tim bagian perencanaan BPKPD pun langsung menindaklanjuti sesuai dengan disposisi pimpinan. Beberapa dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan RKA pun disiapkan, salah satunya dokumen RKBMD yang sudah ditetapkan melalui Surat Keputusan Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 1194/030/2022 tentang Penetapan Rencana Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah (RKBMD Pengadaan) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKBMD Pemeliharaan) Pemerintah Kota Banjar Tahun

Anggaran 2023. Penyusunan RKA BPKPD Tahun 2023 terdiri dari 66 (enam puluh enam sub kegiatan) salah satunya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Dalam penyusunannya dikoordinasikan dengan masing-masing bidang, sehingga pada pelaksanaan input data pun dibantu oleh operator masing-masing bidang. Pada penyusunan RKA kegiatan pengadaan, terdapat 7 jenis barang dan 18 unit barang yang dianggarkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

3. Efektivitas rencana kebutuhan pengadaan barang milik daerah dalam rencana kerja dan anggaran tahun 2023 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar, berdasarkan adanya indikator sebagai berikut :

- a. Produktivitas

Dari 27 (dua puluh tujuh) jenis barang yang diusulkan dalam RKBMD Pengadaan 2023, sebanyak 7 (tujuh) jenis barang terdiri 18 (delapan belas) unit barang yang dianggarkan dalam RKA BPKPD Tahun 2023. Hal ini dianggap bahwa Dokumen RKBMD memiliki produktivitas yang cukup baik pada BPKPD Kota Banjar. Barang yang dianggarkan sudah sesuai dengan barang-

barang yang diusulkan dalam dokumen RKBMD Tahun 2023.

b. Kualitas Layanan

Demi kelancaran tugasnya, Kepala BPKPD melalui usulan RKBMD mengutamakan pengadaan *Personal Computer*, sehingga pada penyusunan RKA BPKPD, mengakomodir untuk pengadaan *personal computer* untuk pegawai sebagai 7 unit komputer. Hal ini bisa mendeskripsikan bahwa RKBMD mampu memberikan kualitas pelayanan melalui penyusunan RKA untuk mengakomodir kebutuhan pegawai guna menunjang proses pelaksanaan program dan kegiatan di BPKPD.

c. Responsivitas

Kebutuhan prioritas untuk kebersihan di lingkungan gedung pertemuan yang dikelola oleh BPKPD, ditunjang dengan pengadaan mesin pemotong rumput untuk menjaga kebersihan di lingkungan gedung yang dikelola oleh BPKPD. Hal ini tentunya menggambarkan bahwa RKBMD BPKPD cukup memenuhi indikator responsivitas atas kebutuhan masyarakat dalam pemeliharaan aset BPKPD Kota Banjar yang tertuang dan terakomodir dalam penyusunan RKA BPKPD Tahun 2023.

d. **Responsibilitas**

Penyusunan RKBMD ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Penyusunan RKA diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada penyusunan RKBMD Tahun 2023, BPKPD mengusulkan RKBMD berdasarkan surat dari pengelola barang. Dalam penyusunan RKA pun mengikuti sebagaimana surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA. Maka secara keseluruhan RKBMD cukup dinilai memiliki responsibilitas dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran BPKPD tahun 2023.

e. **Akuntabilitas**

Melalui usulan perencanaan kebutuhan BPKPD Tahun 2023, dimuat dalam bentuk Laporan atau Dokumen RKBMD Kota Banjar Tahun 2023. Dokumen tersebut dipertanggungjawabkan ketika menyusun RKA BPKPD terutama dalam kegiatan pengadaan BMD yang selanjutnya menjadi bahan rancangan penyusunan APBD. Hal ini menunjukkan RKBMD sudah memiliki nilai akuntabilitas sehingga mampu menjadi pedoman dalam penyusunan RKA

BPKPD Tahun 2023 dan menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada BPKPD Kota Banjar tahun 2023.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap Efektivitas Rencana Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar, peneliti dapat memberikan rekomendasi:

1. Diharapkan dalam penunjang kegiatan dan program SKPD, RKBMD perlu diperhatikan kembali penyusunannya sesuai azas dan ketentuan yang berlaku sehingga dapat digunakan sebagai pedoman penganggaran pada SKPD. Lebih tepatnya adanya kesinambungan untuk setiap rangkaian kegiatan dalam pelaksanaan APBD Kota Banjar.
2. Diharapkan dalam penyusunan RKA SKPD semakin tepat sasaran dan mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan, salah satunya berpedoman dalam RKBMD. Dalam penyusunan RKA akan dijadikan bahan dalam rancangan penyusunan APBD tingkat Kota maka diperlukan koordinasi antar bidang dalam penyusunannya.
3. Diharapkan keterkaitan antara RKBMD dan RKA semakin efektif dengan memenuhi indikator produktivitas, kualitas

pelayanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas sehingga tercipta *good governance* pada program dan kegiatan yang dilaksanakan. Terutama pada indikator yang masih kurang baik saat ini yaitu indikator produktivitas, agar dimaksimalkan kembali kebutuhan riil dari rencana kebutuhan pengadaan barang milik daerah, dengan didukung oleh anggaran yang memadai juga sehingga rencana kerja dan anggaran pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah mampu terpenuhi sesuai rencana kebutuhan. Hal ini tentunya sangat penting mengingat pada produktivitas pegawai dalam bekerja untuk mencapai tujuan organisasi perlu didukung dengan sarana dan prasana penunjang kegiatan.